



Dadang Solihin



# Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD



Dialog Rektor dengan Bappeda Kabupaten Wajo-Sulawesi Selatan  
Mercure Hotel-Jakarta, 8 Januari 2016



## DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com), HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

# Materi

- Anugerah Pangripta Nusantara
- Tahapan dan Kriteria Penilaian RKPD
- Kriteria Penilaian Tahap I: Dokumen RKPD yang menghasilkan Daerah nominasi (Bobot 30%)
- Kriteria Penilaian Tahap II: Verifikasi Proses Penyusunan RKPD (Bobot 30%)
- Kriteria Penilaian Tahap III: Presentasi dan Wawancara (Bobot 40%)



# Anugerah Pangripta Nusantara

- Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
- Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan.
  - Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik.
- Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan.

# Tahapan dan Kriteria Penilaian RKPD

## Penilaian Tahap I terhadap dokumen RKPD yang menghasilkan Daerah nominasi (BOBOT 30%)

1. Keterkaitan
2. Konsistensi
3. Kelengkapan dan Kedalaman
4. Keterukuran

## Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan Daerah nominasi (BOBOT 30%)

1. Proses Perencanaan dari Bawah (*bottom-up*)
2. Proses Perencanaan dari Atas (*top-down*)
3. Proses Perencanaan *Teknokratik*
4. Proses Perencanaan *Politik*
5. *Inovasi*

## Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap Daerah nominasi (BOBOT 40%)

1. Keterkaitan
2. Konsistensi
3. Kelengkapan dan Kedalaman
4. Keterukuran
5. Proses Perencanaan dari Bawah (*bottom-up*)
6. Proses Perencanaan dari Atas (*top-down*)
7. Proses Perencanaan *Teknokratik*
8. Proses Perencanaan *Politik*
9. *Inovasi*
10. Tampilan dan Materi Presentasi
11. Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi

# Kriteria Penilaian Tahap I

dokumen RKPD yang menghasilkan Daerah nominasi (Bobot 30%)

NO.	KRITERIA	INDIKATOR
1.	<b>KETERKAITAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD</li><li>2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP</li></ol>
2.	<b>KONSISTENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Tersedianya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan isu strategis</li><li>4. Tersedianya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan</li><li>5. Tersedianya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan pagu anggaran SKPD</li><li>6. Tersedianya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan program/kegiatan SKPD</li></ol>
3.	<b>KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan</li><li>8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah</li><li>9. Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota</li><li>10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya</li><li>11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya</li><li>12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya</li><li>13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya</li><li>14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan MDG's berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya</li></ol>
4.	<b>KETERUKURAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik</li><li>16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya.</li></ol>

# Kriteria Penilaian Tahap II

## Verifikasi Proses Penyusunan RKPD (Bobot 30%)

KRITERIA	PARAMETER	INDIKATOR
<b>DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%)</b>	1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD	Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang menjadi kegiatan RKPD (12,5%)
	2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD (12,5%)
<b>DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%)</b>	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD dan Prioritas Nasional dalam RKP	Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD dengan RKP (10%)
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD dan RKP	Persentase program dan kegiatan RKPD yang mendukung RKP (10%)
<b>TEKNOKRATIK (20%)</b>	5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD	Persentase program dan kegiatan RKPD yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%)
	6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD	Tingkat kapasitas perencana Bappeda dalam penyusunan RKPD (10%)
<b>POLITIK (20%)</b>	7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD	Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD dengan usulan DPRD (10%)
	8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD	Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%)
<b>INOVASI (15%)</b>	9. Inovasi pada proses perencanaan	Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional (7,5%)
	10. Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan	Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan, contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan (7,5%)

# Kriteria Penilaian Tahap III

## Presentasi dan Wawancara (Bobot 40%)

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	KETERKAITAN	5%
2.	KONSISTENSI	5%
3.	KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	5%
4.	KETERUKURAN	5%
5.	DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	5%
6.	DARI ATAS (TOP-DOWN)	5%
7.	TEKNOKRATIK	5%
8.	POLITIK	5%
9.	INOVASI	5%
10.	TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT	25%
11.	KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI pengetahuan tentang RPJMN 2015-2019, institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu	30%





**Terima Kasih**